

MODEL PERENCANAAN TOP-DOWN

- ◆ Dilaksanakan oleh sekelompok elit politik, melibatkan lebih banyak teknokrat, mengandalkan otoritas & diskresi.
- ◆ Argumentasi *top-down*:
 - Efisiensi
 - Penegakan aturan (*enforcement*)
 - Konsistensi input-target-output
 - Publik/masyarakat masih sulit dilibatkan

MODEL PERENCANAAN BOTTOM-UP

- ◆ Dilaksanakan secara kolektif, melibatkan unsur-unsur *governance*, mengandalkan persuasi, *co-production*.
- ◆ Argumentasi bottom-up:
 - Efektivitas
 - Kinerja (*performance, outcome*), bukan sekadar hasil seketika
 - *Social virtue* (kearifan sosial)
 - Masyarakat diasumsikan sudah paham hak-hak dan apa yang mereka butuhkan.

MENGAPA DEMOKRASI DAN PERENCANAAN PARTISIPATIF?

(Amartya Sen, 1999:148)

- ◆ Demokrasi dan partisipasi sangat penting peranannya dalam pengembangan kemampuan dasar
- ◆ *Instrumental role* untuk memastikan bahwa rakyat bisa mengungkapkan dan mendukung klaim atas hak-hak mereka, di bidang politik maupun ekonomi
- ◆ *Constructive role* dalam merumuskan "kebutuhan" rakyat dalam konteks sosial.

The Practice of Democracy (Fidel Ramos, 1998):

Under dictatorial rule, people need not think – need not choose – need not make up their minds or give their consent. All they need to do is to follow.

....

By contrast, a democracy cannot survive without civic virtue... The political challenge for people around the world today is not just to replace authoritarian regimes by democratic ones. Beyond this, it is to make democracy work for ordinary people.

KEBIJAKAN SOSIAL PERLU PERENCANAAN MULTI-DIMENSI (Thomas et al, 2000:50)

1. Memperbesar aset kelompok miskin dengan memberi akses kepada layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu
2. Memperhatikan efek distributif dari investasi publik, mengurangi subsidi yang kurang produktif
3. Memanfaatkan modal SDM dengan menyediakan tanah, kredit, pelatihan, dan kesempatan kerja bagi orang miskin
4. Melengkapi investasi SDM dengan reformasi ekonomi dan keterbukaan pasar yang meningkatkan produktivitas pendidikan.